



# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II TAHUN 2021**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT JENDERAL**

**PERIODE 31 DESEMBER 2021**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT khususnya divisi Keimigrasian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kepala Kantor Wilayah,

Marciana Dominika Jone, S.H  
NIP 196411261991032001

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| Sampul  | i   |
| Kata Pengantar  | ii  |
| Daftar Isi  | iii |
| Pernyataan Tanggung Jawab                             | iv  |
| Ringkasan   | 1   |
| Laporan Realisasi Anggaran                            | 1   |
| Neraca  | 1   |
| Laporan Operasional                                   | 2   |
| Laporan Perubahan Ekuitas                             | 2   |
| Catatan atas Laporan Keuangan                         | 2   |
| A. Penjelasan Umum                                    | 8   |
| B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran | 19  |
| C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca                     | 26  |
| D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional        | 52  |
| E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas  | 57  |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya                       | 60  |
| Lampiran dan Daftar                                   | v   |



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM & HAM NTT**

***JL. WJ LALAMENTIK NO. 98, KUPANG NTT***

***85111***

---

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Penggabungan Laporan Keuangan Ditjen Keimigrasian di tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kupang, 31 Desember 2021

Kepala Kantor Wilayah,

Marciana Dominika Jone, S.H

NIP 196411261991032001

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel penyusutan Aset Tetap
2. Neraca Percobaan Saldo Awal
3. Neraca Komparatif
4. Laporan Operasional
5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan per Akun
6. Laporan Realisasi Anggaran Belanja per Akun
7. Laporan Neraca Percobaan Akrua
8. Laporan Neraca Percobaan Kas
9. Laporan Perubahan Ekuitas
10. Telaah Laporan Keuangan
11. BAR Analisis
12. Rekap Akun
13. Rekening Koran satuan Kerja
14. Jurnal Memo Penyesuaian

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 31 Desember 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan per 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada per 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp 65.047.751,-**

Realisasi Belanja Negara pada per 31 Desember 2021 adalah sebesar **18.592.721.611,-** atau mencapai **89,82** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp20.699.199.000,-**

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada per 31 Desember 2021. Nilai Aset per per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar **68.945.336.713,-** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp16.769.950,-**; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0,-; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp68.891.161.374,-**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp37.405.389,-**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp0,-** dan **Rp68.945.336.713,-**.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp27.129.628,-** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp17.230.091.242,-** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **(Rp17.202.961.614)**. Surplus dari kegiatan Non Operasional senilai **Rp37.918.123,-** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **(Rp17.165.043.491)**.

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah senilai **Rp75.726.693.906,-** ditambah Defisit-LO sebesar **(Rp17.165.043.491)** kemudian ditambah dengan Koreksi Atas Reklasifikasi dan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi masing-masing senilai **Rp 0,-** dan **Rp 7.044.089.684,-** dikurangi Transaksi Antar Entitas senilai **Rp17.427.775.982,-** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal per 31 Desember 2021 adalah senilai **Rp68.945.336.713,-**

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal per 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2021 DAN 2020

*(Dalam Rupiah)*

| URAIAN                        | CATATAN | TA 2021               |                       | % thd Angg   | TA 2020               |
|-------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|                               |         | ANGGARAN              | REALISASI             |              | REALISASI             |
| <b>PENDAPATAN</b>             |         |                       |                       |              |                       |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1     | -                     | 65.047.751            | 0            | 105.908.960           |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>      |         | -                     | <b>65.047.751</b>     | <b>0</b>     | <b>105.908.960</b>    |
| <b>BELANJA</b>                | B.2.    |                       |                       |              |                       |
| Belanja Pegawai               | B.3     | 9.761.484.000         | 9.674.546.149         | 99,11        | 8.764.836.549         |
| Belanja Barang                | B.4     | 6.078.154.000         | 5.830.841.415         | 95,93        | 5.602.733.561         |
| Belanja Modal                 | B.5     | 4.859.561.000         | 3.087.334.047         | 63,53        | 1.604.824.336         |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>         |         | <b>20.699.199.000</b> | <b>18.592.721.611</b> | <b>89,82</b> | <b>15.972.394.446</b> |

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.***

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT**  
**NERACA**  
**PER 31 Desember 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN   | CATATAN | 2021                  | 2020                  |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ASET</b>                                      |         |                       |                       |
| <b>ASET LANCAR</b>                               |         |                       |                       |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                     | C.1     | -                     | -                     |
| Persediaan                                       | C.2     | 16.769.950            | 3.173.500             |
| Jumlah Aset Lancar                               |         | 16.769.950            | 3.173.500             |
| <b>ASET TETAP</b>                                |         |                       |                       |
| Tanah  | C.3     | 49.122.225.800        | 49.256.358.800        |
| Peralatan dan Mesin                              | C.4     | 11.353.054.972        | 11.352.068.972        |
| Gedung dan Bangunan                              | C.5     | 20.607.442.531        | 22.940.815.836        |
| Aset Tetap Lainnya                               | C.6     | 96.656.391            | 96.656.391            |
| Konstruksi dalam pengerjaan                      | C.7     | 2.147.614.835         | -                     |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                  | C.8     | - 14.435.833.155      | - 13.307.125.240      |
| Jumlah Aset Tetap                                |         | 68.891.161.374        | 70.338.774.759        |
| <b>ASET LAINNYA</b>                              |         |                       |                       |
| Aset Lain-Lain                                   | C.9     | 712.227.549           | 7.150.790.949         |
| Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya | C.10    | - 674.822.160         | - 1.766.045.302       |
| Jumlah Aset Lainnya                              |         | 37.405.389            | 5.384.745.647         |
| <b>JUMLAH ASET</b>                               |         | <b>68.945.336.713</b> | <b>75.726.693.906</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                                 |         |                       |                       |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                   |         |                       |                       |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek                   | C.11    | -                     | -                     |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                          |         | -                     | -                     |
| <b>EKUITAS</b>                                   |         |                       |                       |
| Ekuitas  | C.12    | 68.945.336.713        | 75.726.693.906        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                            |         | <b>68.945.336.713</b> | <b>75.726.693.906</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>              |         | <b>68.945.336.713</b> | <b>75.726.693.906</b> |

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR per 31 Desember 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

| URAIAN  | cat | 2021             | 2020             |
|---|-----|------------------|------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL                                  |     |                  |                  |
| PENDAPATAN  |     |                  |                  |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak                         | D.1 | 27.129.628       | 44.827.454       |
| JUMLAH PENDAPATAN                                     |     | 27.129.628       | 44.827.454       |
| BEBAN   |     |                  |                  |
| Beban Pegawai   | D.2 | 9.674.546.149    | 8.764.836.549    |
| Beban Persediaan                                      | D.3 | 193.237.650      | 90.748.050       |
| Beban Barang dan Jasa                                 | D.4 | 3.376.516.518    | 3.316.308.661    |
| Beban Pemeliharaan                                    | D.5 | 928.989.715      | 823.132.600      |
| Beban Perjalanan Dinas                                | D.6 | 1.318.501.082    | 1.378.450.750    |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                       | D.7 | 1.738.300.128    | 2.082.544.805    |
| JUMLAH BEBAN  |     | 17.230.091.242   | 16.456.021.415   |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL           |     | (17.202.961.614) | (16.411.193.961) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL                              | D.8 |                  |                  |
| Surplus Penjualan Aset Nonlancar                      |     | -                | -                |
| Pendapatan pelepasan aset non lancar                  |     | -                | -                |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar                       |     | -                | -                |
| SURPLUS/DEFISIT dari kegiatan non operasional lainnya |     | -                | -                |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya      |     | 37.918.123       | 61.081.506       |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya           |     | -                | -                |
| SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL        |     | 37.918.123       | 61.081.506       |
| SURPLUS/DEFISIT LO                                    |     | (17.165.043.491) | (16.350.112.455) |

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT

#### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR per 31 Desember 2021 DAN 2020

*(Dalam Rupiah)*

| URAIAN                                 | CATATAN | 2021                   | 2020                  |
|--|---------|------------------------|-----------------------|
| <b>EKUITAS AWAL</b>                    | E.1     | 75.726.693.906         | 75.758.337.351        |
| SURPLUS/DEFISIT LO                     | E.2     | (17.165.043.491)       | (10.706.907.513)      |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI       | E.3     | -                      | 884.644.751           |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN             | E.3.1   | -                      | -                     |
| KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR           | E.3.2   | -                      | -                     |
| PENYESUAIAN NILAI ASET                 | E.3.3   | -                      | -                     |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN               | E.3.4   | -                      | -                     |
| KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI             | E.3.5   | -                      | (662.626.512)         |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP           | E.3.6   | (7.044.089.684)        | 884.644.751           |
| KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI | E.3.7   | -                      | -                     |
| JUMLAH                                 |         | <b>(7.044.089.684)</b> | <b>222.018.239</b>    |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS                | E.4     | 17.427.775.982         | 16.096.450.771        |
| <b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>      | E.5     | <b>(6.781.357.193)</b> | <b>(31.643.445)</b>   |
| <b>EKUITAS AKHIR</b>                   | E.6     | <b>68.945.336.713</b>  | <b>75.726.693.906</b> |

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur

*Dasar  
Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT didirikan dengan tujuan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demi mewujudkan tujuan diatas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT berkomitmen dengan visi “ Masyarakat Nusa Tenggara Timur memperoleh kepastian hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang berlandaskan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha”.

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi aparatur hukum dan hak asasi manusia.
2. Menyelenggarakan tertib administrasi.
3. Menyelenggarakan pelayanan dan penegakan hukum di bidang Masyarakat, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual.
4. Menyelenggarakan penyuluhan hukum dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
5. Menyelenggarakan perlindungan, pemajuan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri Laporan REalisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah system yang menghasilkan informasi asset tetap, persediaan, dan asset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur menerapkan basis akruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. **Basis akruaI** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan **basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

*Dasar Pengukuran* Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

*Kebijakan Akuntansi* Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur divisi Keimigrasian adalah sebagai berikut:

### (1) Pendapatan- LRA

#### *Pendapatan -LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Pendapatan* (2) **Pendapatan- LO**

#### *-LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (3) **Belanja**

#### *Belanja*

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali



oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Beban** (4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

**Aset** Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**Aset** a. **Aset Lancar**

**Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang

dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian   | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar           | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo                                   | 0.5%       |
| Kurang Lancar    | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan   | 10%        |
| Diragukan        | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan     | 50%        |
| Macet            | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100%       |
|                  | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN                |            |

- Tagihan Penjualan *Angsuran* (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat *berdasarkan* hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset  
Tetap*

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2020, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jarinan, dan irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai

kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatannya. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.

- Pada tahun 2020, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2020 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan

BMN/BMD.

### *Penyusutan* c. **Penyusutan Aset Tetap**

#### *Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### *Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

| <b>Kelompok Aset Tetap</b> | <b>Masa Manfaat</b> |
|----------------------------|---------------------|
| Peralatan dan Mesin        | 2 s.d. 20 tahun     |

|  |                  |
|--|------------------|
| Gedung dan Bangunan                    | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi            | 5 s.d 40 tahun   |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun          |

**d. Piutang Jangka Panjang**

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

*Aset  
Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

| Kelompok Aset Tak Berwujud  | Masa Manfaat (tahun) |
|---|----------------------|
| Software Komputer   | 4                    |
| Franchise   | 5                    |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10                   |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.                      | 20                   |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan                                     | 25                   |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.           | 50                   |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I  | 70                   |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### **Kewajiban (6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas* (7) **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.1 PENDAPATAN

Realisasi

Pendapatan

Rp65.047.751,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp65.047.751,-**. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT berasal dari beberapa sumber antara lain : Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, Penerimaan kembali belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal tahun anggaran yang lalu serta Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

#### *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021*

| Uraian   | 2021     |                   |              |
|--|----------|-------------------|--------------|
|  | Anggaran | Realisasi         | % Real Angg. |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan         | -        | 6.721.492         | -            |
| Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | -        | 20.408.136        | -            |
| Penerimaan kembali Belanja Pegawai TA yg lalu      | -        | 206               | -            |
| Penerimaan kembali Belanja Barang TA yg lalu       | -        | 5.465.000         | -            |
| Penerimaan Kembali Belanja Modal TA yang lalu      | -        | 32.452.917        | -            |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>-</b> | <b>65.047.751</b> | <b>-</b>     |

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 mengalami Penurunan sebesar 38, 58 % dibandingkan realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2021 terdapat penurunan yang signifikan pada akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.

Berikut rincian persentase dari kenaikan pendapatan tersebut :

#### *Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020*

| URAIAN   | REALISASI T.A. 2021 | REALISASI T.A. 2020 | NAIK (TURUN) % |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Pendapatan sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan        | 6.721.492           | 35.180.748          | - 80,89        |
| Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | 20.408.136          | 9.646.706           |                |
| Penerimaan kembali belanja Pegawai TA yg lalu      | 206                 | 370.106             | - 99,94        |
| Penerimaan kembali belanja Barang TA yg lalu       | 5.465.000           | 31.024.000          | - 82,38        |
| Penerimaan kembali belanja Modal TA yg lalu        | 32.452.917          | 29.687.400          | 9,32           |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>65.047.751</b>   | <b>105.908.960</b>  | <b>- 38,58</b> |

Realisasi

## B.2. BELANJA

Belanja

Negara

Rp18.592.7

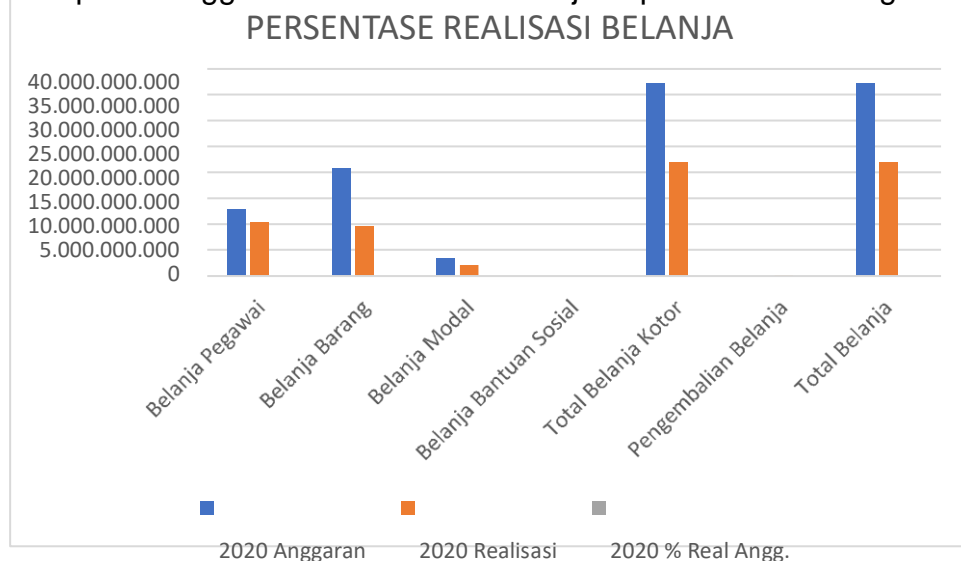
21.611,-

Realisasi Belanja pada per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp18.592.721.611,-** atau **89,82%** dari anggaran belanja sebesar **Rp20.699.199.000,-** Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut:

### Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

| Uraian                     | 2021                  |                       |              |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                            | Anggaran              | Realisasi             | % Real Angg. |
| Belanja Pegawai            | 9.761.484.000         | 9.674.546.149         | 99,11        |
| Belanja Barang             | 5.974.674.000         | 5.830.841.415         | 97,59        |
| Belanja Modal              | 4.963.041.000         | 3.087.334.047         | 62,21        |
| <b>Total Belanja Kotor</b> | <b>20.699.199.000</b> | <b>18.592.721.611</b> | <b>89,82</b> |
| Pengembalian Belanja       | -                     | 11.529.363            |              |
| <b>Total Belanja</b>       | <b>20.699.199.000</b> | <b>18.592.721.611</b> | <b>89,82</b> |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



## Belanja

### B.3 Belanja Pegawai

#### Pegawai

Rp9.674.546.149,-

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp9.674.546.149,-** dan **Rp8.764.836.549,-**

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,37 persen dari realisasi belanja TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya kenaikan gaji berkala
2. Adanya kenaikan pangkat pegawai
3. Penambahan Pegawai yang menjadi Pejabat Fungsional Tertentu (JFT).
4. Mutasi Pegawai dan Penambahan CPNS

#### Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020

| URAIAN                        | REALISASI TA<br>2021 | REALISASI TA<br>2020 | NAIK<br>(TURUN) % |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Belanja gaji Pokok PNS        | 6.569.865.200        | 6.095.246.600        | 7,79              |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 110.801              | 94.756               | 16,93             |
| Belanja Tunj. Suami/steri PNS | 411.425.228          | 370.786.510          | 10,96             |
| Belanja Tunj. Anak PNS        | 118.565.546          | 112.110.682          | 5,76              |
| Belanja Tunj. Struktural PNS  | 449.960.000          | 404.405.000          | 11,26             |
| Belanja Tunj. Fungsional PNS  | 313.484.000          | 224.911.000          | 39,38             |
| Belanja Tunj. PPh PNS         | 31.112.100           | 23.685.933           | 31,35             |
| Belanja Tunj. Beras PNS       | 351.019.740          | 280.482.660          | 25,15             |
| Belanja Uang makan PNS        | 1.133.680.000        | 966.622.000          | 17,28             |
| Belanja Tunj Umum PNS         | 204.015.000          | 202.670.000          | 0,66              |
| Belanja Uang Lembur           | 91.866.000           | 90.132.000           | 1,92              |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>   | <b>9.675.103.615</b> | <b>8.771.147.141</b> | 10,31             |
| Pengembalian Belanja Pegawai  | 557.466              | 5.985.542            | (90,69)           |
| <b>Jumlah Belanja</b>         | <b>9.674.546.149</b> | <b>8.765.161.599</b> | <b>10,37</b>      |

Belanja  
Barang  
Rp  
5.830.841.  
415,-

#### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp 5.830.841.415,-** dan **Rp 5.602.733.561,-** Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar **4,07%** dari Realisasi Belanja Barang TA 2020. Hal ini terjadi disebabkan oleh Kenaikan Belanja Persediaan.

##### Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 2020

| URAIAN                          | REALISASI TA 2021    | REALISASI TA 2020    | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Belanja Barang Operasional      | 1.363.513.833        | 1.471.208.150        | (7,32)               |
| Belanja Barang Non Operasional  | 447.925.859          | 498.364.050          | (10,12)              |
| Belanja Jasa                    | 1.565.076.826        | 1.338.786.461        | 16,90                |
| Belanja Pemeliharaan            | 910.515.315          | 833.101.900          | 9,29                 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 1.318.501.082        | 1.378.450.750        | (4,35)               |
| Belanja Persediaan              | 225.308.500          | 82.822.250           | 172,04               |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>     | <b>5.830.841.415</b> | <b>5.602.733.561</b> | <b>4,07</b>          |
| Pengembalian Belanja            | -                    | -                    | -                    |
| <b>Jumlah Belanja</b>           | <b>5.830.841.415</b> | <b>5.602.733.561</b> | <b>4,07</b>          |

#### Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur mengalokasikan belanja barang untuk penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp 152.467.000,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

| Akun          | Uraian Akun  | Pagu               | Realisasi          |
|---------------|--|--------------------|--------------------|
| 521131        | Belanja Barang Operasional-<br>Penanganan Pandemi COVID-19     | 87.125.000         | 85.310.000         |
| 521241        | Belanja Barang Non Operasional-<br>Penanganan Pandemi COVID-22 | 899.000            | -                  |
| 521841        | Belanja Barang Persediaan-<br>Penanganan Pandemi COVID-20      | 500.000            | -                  |
| 522192        | Belanja Jasa-Penanganan Pandemi<br>COVID-21                    | 31.344.000         | 29.991.000         |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>152.467.000</b> | <b>115.301.000</b> |

Belanja  
Modal  
Rp3.087.33  
4.047,-

### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp 3.087.334.047,-**. Dan **Rp 1.604.824.336,-**

#### B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,- mengalami penurunan bila dibandingkan dengan TA 2020 yaitu sebesar Rp 3.710.250,-

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 2020*

| URAIAN   | REALISASI T.A.<br>2021 | REALISASI T.A.<br>2020 | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                          | 0                      | 3.710.250              | #DIV/0!              |
| Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin               | 0                      |                        | 0,00                 |
| Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin | 0                      |                        | 0,00                 |
| Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin               | 0                      |                        | 0,00                 |
| Belanja Modal Penanganan Pandemi Covid-19                  | 0                      |                        | 100,00               |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>                                | <b>0</b>               | <b>3.710.250</b>       | <b>#DIV/0!</b>       |
| Pengembalian   | 0                      | 0                      | 0,00                 |
| <b>Jumlah Belanja</b>                                      | <b>0</b>               | <b>3.710.250</b>       | <b>#DIV/0!</b>       |

#### B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp3.087.334.047,-** dan **Rp1.601.114.086,-**. Realisasi belanja gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 mengalami Kenaikan sebesar 93 persen dari tahun 2020.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020*

| URAIAN JENIS BELANJA                                       | REALISASI T.A.<br>2021 | REALISASI T.A.<br>2020 | NAIK<br>(TURUN) % |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan                          | 0                      | 1.070.939.750          | -100              |
| Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan               | 3.087.334.047          | 530.174.336            | 482               |
| Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan |                        |                        | 0                 |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>                                | <b>3.087.334.047</b>   | <b>1.601.114.086</b>   | <b>93</b>         |
| Pengembalian Belanja Modal                                 | 0                      | 0                      | 0                 |
| <b>Jumlah Belanja</b>                                      | <b>3.087.334.047</b>   | <b>1.601.114.086</b>   | <b>93</b>         |



KANTOR WILAYAH NTT



## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### Persediaan C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp0,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 0,-** yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

#### Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

| Keterangan    | TH 2021  | TH 2020  |
|---------------|----------|----------|
| Bank          | -        | -        |
| Uang Tunai    | -        | -        |
| <b>Jumlah</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

### Persediaan C.2 Persediaan

Rp16.769.95

0,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar **Rp16.769.950,-** dan **Rp 3.173.500,-**

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020

| Persediaan                | TH 2021           | TH 2020          |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| Barang Konsumsi           | 13.170.450        | 490.000          |
| Barang untuk Pemeliharaan | 3.599.500         | 2.683.500        |
| <b>Jumlah</b>             | <b>16.769.950</b> | <b>3.173.500</b> |

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

### Tanah Rp C.3 Tanah

49.122.22

5.800,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp 49.122.225.800** dan **Rp 49.256.358.800**.



## Rincian Mutasi Tanah

| KETERANGAN                                    | JUMLAH               |
|---|----------------------|
| Saldo per 01 Januari 2021                     | 49.256.358.800       |
| <b>A. Mutasi Tambah</b>                       |                      |
| Penambahan saldo awal                         | -                    |
| Pembelian                                     | -                    |
| Transfer Masuk                                | -                    |
| Hibah Masuk                                   | -                    |
| Penyelesaian Pembangunan dengan KDP           | -                    |
| Reklasifikasi Masuk                           | -                    |
| Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap | -                    |
| Pengembangan Nilai Aset                       | -                    |
| Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)        | -                    |
| Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset             | -                    |
| Pengembangan Melalui KDP                      | -                    |
| Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap          | -                    |
| <b>Jumlah Mutasi Tambah</b>                   | -                    |
|   |                      |
| <b>B. Mutasi Kurang</b>                       |                      |
| Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap          |                      |
| Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)        | -                    |
| Penghapusan                                   | -                    |
| Transfer Keluar                               | 134.133.000          |
| Hibah Keluar                                  | -                    |
| Reklasifikasi Keluar                          | -                    |
| Penghentian Aset dari Penggunaan              | -                    |
| <b>Jumlah Mutasi Kurang</b>                   | 134.133.000          |
| <b>Jumlah Mutasi</b>                          | <b>(134.133.000)</b> |
| Saldo per 30 Septe 2019                       | 49.122.225.800       |
| Akumulasi Penyusutan                          | -                    |
| Nilai Buku per 30 Juni 2020                   | 49.122.225.800       |

Penjelasan Mutasi Kurang : Hal ini disebabkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT melakukan Transfer Keluar pada :

1. Satuan Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lembata sebesar **Rp 87.334.000,-** berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Seluas 993 m<sup>2</sup>.
2. Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua sebesar **Rp46.799.000,-** berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah.

Rincian Data Tanah Berdasarkan Kondisinya

| Kondisi      | Kuantitas<br>(m <sup>2</sup> ) | Nilai<br>(Rp)    |
|--------------|--------------------------------|------------------|
| Baik         | 35.492 m <sup>2</sup>          | Rp29.076.333.000 |
| Rusak Ringan | 0 m <sup>2</sup>               | Rp 0.00          |
| Rusak Berat  | 0 m <sup>2</sup>               | Rp 0.00          |

**Peralatan dan Mesin** **C.4 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah **Rp 11.353.054.972,-** dan **Rp 11.352.068.972,-** . Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b> | <b>11.352.068.972</b> |
| Mutasi tambah:                                    |                       |
| Pembelian   | 0                     |
| Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi         | 14.750.000            |
| Hibah Barang                                      | 0                     |
| Transfer Masuk                                    | 11.651.000            |
| Koreksi tambah                                    | 0                     |
| Mutasi kurang:                                    | 0                     |
| Koreksi kurang                                    | (11.415.000)          |
| Transaksi Normalisasi BMN                         | (14.000.000)          |
| Penghentian dari penggunaan                       | -                     |
| <b>Saldo per 30 September 2021</b>                | <b>11.353.054.972</b> |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020        | -10.543.255.648       |
| <b>Nilai Buku per 30 September 2021</b>           | <b>809.799.324</b>    |

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**Gedung dan Bangunan** **C.5. Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah **Rp20.607.442.531,-** dan **Rp22.940.815.836**. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| <b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b> |                 |
|---|-----------------|
| 22.040.815.836                                    |                 |
| Mutasi tambah:                                    |                 |
| Pembangunan                                       | 939.719.212     |
| Transfer Masuk                                    |                 |
| Mutasi kurang:                                    | -               |
| Transfer Keluar                                   | 1.126.979.000   |
| Koreksi Kurang                                    | (2.146.113.517) |
| <b>Saldo per 30 September 2021</b>                |                 |
| 20.607.442.531                                    |                 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2021       | (3.861.779.374) |

Mutasi transaksi Pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Pembangunan Rp 939.719.212 berupa Rehab Bagian Depan Kantor

- Transfer Keluar Rp. 1.126.979.000

Perincian Transfer Keluar :

- Ke Lapas Kelas III Lembata : 1 Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat

- Ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua : 1 Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya Rp96.656.391,-*

#### **C.6. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah **Rp96.656.391,-** dan **Rp96.656.391,-**. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2021, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

| <b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b> | <b>96.656.39</b>  |
|---|-------------------|
| Mutasi tambah:                                    |                   |
| -   | 0                 |
| Mutasi kurang:                                    |                   |
| -   | 0                 |
| <b>Saldo per 30 September 2021</b>                | <b>96.656.39</b>  |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2021       | 0                 |
| <b>Nilai Buku per 30 September 2021</b>           | <b>96.656.391</b> |

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp2.147.614.835,-

## C.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp2.147.614.835,- dan Rp 0,-** yang merupakan pembangunan Rehab Aula Kantor dan Rehab Ruang Arsip yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Pembangunan Rehab Gedung tersebut sesuai dengan rincian Kontrak sebagai berikut:

- Rehab Aula Kantor, Kontrak Nomor: W22-KU.01.03-4557 tanggal 20 Agustus 2021 dengan nilai kontrak Rp 2.421.884.890 oleh pelaksana CV. Benua Zaphir.

Pada tanggal pelaporan penyelesaian gedung tersebut telah mencapai progress 65%.

- Rehab Ruang Arsip, Kontrak Nomor: W22-KU.01.03-4360 tanggal 06 Agustus 2021 dengan nilai kontrak Rp802.899.167 oleh pelaksana CV. Benua Zaphir.

Pada tanggal pelaporan penyelesaian gedung tersebut telah mencapai progress 45%

dengan sumber dana rupiah murni.

Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp(14.435.833.155),-

## C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing **Rp (14.435.833.155)** dan **Rp (13.307.125.240)**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
TA 2021 dan 2020*

| No                          | Aset Tetap          | Nilai Perolehan       | Akumulasi Penyusutan  | Nilai Buku            |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                           | Peralatan dan Mesin | 11.353.054.972        | 10.543.255.648        | 809.799.324           |
| 2                           | Gedung dan Bangunan | 20.607.442.531        | 3.892.577.507         | 16.714.865.024        |
| 3                           | Aset Tetap Lainnya  | 96.656.391            | 0                     | 96.656.391            |
| <b>Akumulasi Penyusutan</b> |                     | <b>32.057.153.894</b> | <b>14.435.833.155</b> | <b>17.621.320.739</b> |

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran

Laporan Keuangan ini.

Aset Lain-Lain  
Rp712.227.549,-

### C.9 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah **Rp712.227.549,-** dan **Rp7.150.790.949,-**. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Saldo per 31 Desember 2020</b>       | <b>7.150.790.949</b>   |
| <b>Mutasi tambah:</b>                   |                        |
| - reklasifikasi dari aset tetap         | -                      |
| <b>Mutasi kurang:</b>                   |                        |
| - Koreksi Pencatatan                    | (6.438.563.400)        |
| - penghapusan BMN                       | -                      |
| <b>Saldo per 30 September 2021</b>      | <b>712.227.549</b>     |
| Akumulasi Penyusutan                    | (1.832.097.254)        |
| <b>Nilai Buku per 30 September 2021</b> | <b>(1.119.869.705)</b> |

Akumulasi  
Penyusutan  
dan  
Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp(674.822.  
160),-

### C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing **Rp (674.822.160),-** dan **Rp (1.766.045.302),-**. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

| Aset Tetap        | Nilai Perolehan    | Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi | Nilai Buku        |
|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| Aset Tak Berwujud |                    |                                  |                   |
| Software          | 0                  | 0                                | 0                 |
| <b>Jumlah</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>          |
| Aset Lain-lain    | 712.227.549        | 674.822.160                      | 37.405.389        |
| <b>Jumlah</b>     | <b>712.227.549</b> | <b>674.822.160</b>               | <b>37.405.389</b> |

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka  
dari KPPN  
Rp0*

### **C.11 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 0,-**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Ekuitas  
Rp68.945.33  
6.713,-*

### **C.12 Ekuitas**

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp68.945.336.713,-** dan **Rp75.726.693.906,-**

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan  
PNBP Rp  
27.129.628,-

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, Pendapatan dari denda serta pendapatan dari anggaran lain-lain. Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar **Rp 27.129.628,-** dan **Rp 44.827.454,-** Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020*

| URAIAN   | REALISASI T.A.<br>2021 | REALISASI T.A.<br>2020 | NAIK (TURUN)<br>% |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| Pendapatan sewa tanah, gedung & bangunan           | 6.721.492              | 35.180.748             | -80,89            |
| Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | 20.408.136             | 9.646.706              | 0,00              |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>27.129.628</b>      | <b>44.827.454</b>      | <b>-39,48</b>     |

Beban Pegawai  
Rp9.674.546.1  
49,-

### D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp9.674.546.149,-** dan **Rp8.764.836.549,-**.



*Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020*

| URAIAN                       | REALISASI TA<br>2021 | REALISASI TA<br>2020 | NAIK<br>(TURUN) % |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Beban gaji Pokok PNS         | 6.569.865.200        | 6.095.246.600        | 7,79              |
| Beban Pembulatan Gaji PNS    | 108.335              | 94.264               | 14,93             |
| Beban Tunj. Suami/isteri PNS | 411.425.228          | 370.786.510          | 10,96             |
| Beban Tunj. Anak PNS         | 118.565.546          | 112.110.682          | 5,76              |
| Beban Tunj. Struktural PNS   | 449.960.000          | 400.085.000          | 12,47             |
| Beban Tunj. Fungsional PNS   | 313.484.000          | 224.585.950          | 39,58             |
| Beban Tunj. PPh PNS          | 31.112.100           | 23.685.933           | 31,35             |
| Beban Tunj. Beras PNS        | 351.019.740          | 280.482.660          | 25,15             |
| Beban Uang makan PNS         | 1.133.680.000        | 966.622.000          | 17,28             |
| Beban Tunj Umum PNS          | 203.460.000          | 201.004.950          | 1,22              |
| Beban Uang Lembur            | 91.866.000           | 90.132.000           | -                 |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>  | <b>9.674.546.149</b> | <b>8.764.836.549</b> | <b>10,38</b>      |
| Pengembalian Belanja Pegawai | 557.466              | 5.985.542            | -                 |
| <b>Jumlah Belanja</b>        | <b>9.673.988.683</b> | <b>8.758.851.007</b> | <b>10,45</b>      |

*Beban  
Persediaan Rp  
193.237.650,-*

### **D.3 Beban Persediaan**

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan pada per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp 193.237.650,-** dan **Rp 90.748.050,-** Rincian Beban Persediaan untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020*

| URAIAN JENIS BEBAN             | TH 2021            | TH 2020           | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Beban Persediaan Konsumsi      | 193.237.650        | 90.748.050        | 112,94               |
| <b>Jumlah Beban Persediaan</b> | <b>193.237.650</b> | <b>90.748.050</b> | <b>112,94</b>        |

*Beban  
Barang dan  
Jasa  
Rp3.376.516  
.518*

### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, Beban Barang dan Jasa per

31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar,-  
**Rp3.376.516.518,-** dan **Rp 3.316.308.661,-** dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020*

| URAIAN JENIS BEBAN                                    | TH 2021              | TH 2020              | NAIK<br>(TURUN) % |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Beban Keperluan Perkantoran                           | 822.546.203          | 834.439.150          | -1,43             |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                | 10.750.900           | 20.448.500           | -47,42            |
| Beban Honor Operasional satuan Kerja                  | 208.290.000          | 171.300.000          | 21,59             |
| Beban Barang Operasional Lainnya                      | 236.616.730          | 227.418.500          | 4,04              |
| Beban Barang Operasional -Penanganan Pandemi COVID-19 | 85.310.000           | 217.602.000          | -60,80            |
| Beban Bahan   | 341.650.150          | 427.065.050          | -20,00            |
| Beban Honor Output Kegiatan                           | 51.800.000           | 26.240.000           | 97,41             |
| Beban Barang Non Operasional lainnya                  | 54.475.709           | 45.059.000           | 20,90             |
| Beban Langganan Listrik                               | 205.565.008          | 220.652.461          | -6,84             |
| Beban Langganan Air                                   | 8.440.000            | 10.580.000           | -20,23            |
| Beban Langanan Daya dan Jasa Lainnya                  | 0                    | 64.000.000           | -100,00           |
| Beban Sewa  | 1.295.880.818        | 168.416.000          | 669,45            |
| Beban Jasa Profesi                                    | 25.200.000           | 42.250.000           | -40,36            |
| Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19                | 29.991.000           | 832.888.000          | -96,40            |
| Beban Aset Ekstrakomtabel peralatan dan Mesin         |                      | 7.950.000            | -100,00           |
| pengembalian beban barang dan jasa                    | 0                    | 0                    | 0,00              |
| <b>Jumlah</b>   | <b>3.376.516.518</b> | <b>3.316.308.661</b> | <b>1,82</b>       |

*Beban*

*Pemeliharaan*

*Rp928.989*  
*.715,-*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp928.989.715,-** dan **Rp 823.132.600,-** Rincian beban pemeliharaan untuk per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020*

| URAIAN JENIS BEBAN   | TH 2021            | TH 2020            | NAIK<br>(TURUN) % |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                             | 417.585.353        | 354.886.000        | 17,67             |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                             | 492.929.962        | 445.234.800        | 10,71             |
| Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan                          | 18.474.400         | 16.992.200         | 8,72              |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi COVID-19 | 0                  | 6.019.600          | -                 |
| Pengembalian   | 0                  | 0                  | -                 |
| <b>Jumlah</b>  | <b>928.989.715</b> | <b>823.132.600</b> | <b>12,86</b>      |

Beban

## D.6 Beban Perjalanan Dinas

Perjalanan  
Dinas Rp  
1.318.501.  
082,-

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp 1.318.501.082,-** dan **Rp 1.296.050.750,-** Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

### Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020

| URAIAN JENIS BEBAN                | TH 2021              | TH 2020              | NAIK<br>(TURUN) |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Beban Perjalanan Biasa            | 1.155.221.082        | 1.296.050.750        | -10,87          |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 163.280.000          | 82.400.000           | 98,16           |
| Pengembalian                      | 0                    | 0                    | 0,00            |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>1.318.501.082</b> | <b>1.378.450.750</b> | <b>-4,35</b>    |

Beban

## D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan  
dan  
Amortisasi  
Rp1.738.3  
00.128,-

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp1.738.300.128,-** dan **Rp2.082.544.805,-**. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2021 dan 2020*

| URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI        | TH 2021              | TH 2020              | NAIK (TURUN) % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin          | 725.519.380          | 971.806.105          | (25)           |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan          | 945.062.478          | 978.634.797          | (3)            |
| Beban Penyusutan Aset tetap yg tdk digunakan  | 67.718.270           | 132.103.903          | (49)           |
| <b>Jumlah Penyusutan</b>                      | <b>1.738.300.128</b> | <b>2.082.544.805</b> | <b>(17)</b>    |
| Beban Amortisasi Software                     | -                    | -                    | -              |
| Beban Amortisasi ATB Lainnya                  |                      |                      |                |
| Beban Penyusutan Aset Lain-lain               |                      |                      | -              |
| <b>Jumlah Amortisasi</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>       |
| <b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b> | <b>1.738.300.128</b> | <b>2.082.544.805</b> | <b>(17)</b>    |

### D.8 Kegiatan Non Operasional

Surplus  
dari  
Kegiatan  
Non  
Operasional  
al  
Rp37.918.  
123,-

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut

*Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020*

| URAIAN JENIS BEBAN                               | TH 2021           | TH 2020           | NAIK (TURUN)  |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya | 37.918.123        | 61.081.506        | -3,79         |
| <b>Jumlah</b>                                    | <b>37.918.123</b> | <b>61.081.506</b> | <b>-37,92</b> |

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### Ekuitas

#### E.1 Ekuitas Awal

#### Awal

Rp75.726.693.906,-

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp 75.726.693.906** dan **Rp 75.758.337.351**.

#### Defisit LO

#### E.2 Surplus (Defisit) LO

Rp(17.165.043.491),-

Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah defisit sebesar **Rp (17.165.043.491),-** dan **Rp(16.350.112.455),-**.

#### Koreksi

#### E.3 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

#### Nilai Aset

#### Tetap Non

#### Revaluasi

#### Rp

(7.044.089.684),-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar **Rp (7.044.089.684),-** dan **Rp 884.644.751,-**.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2021*

| Jenis Aset Tetap                | Nilai Koreksi   |
|---------------------------------|-----------------|
| Peralatan dan Mesin             | (11.415.000)    |
| Gedung dan Bangunan             | (2.146.113.517) |
| Aset Tetap yang tidak digunakan | (6.438.563.400) |

#### Transaksi

#### E.4 Transaksi Antar Entitas

#### Antar

#### Entitas

Rp10.885.375.411,-

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp 17.427.775.982,-** dan **Rp16.096.450.771,-** Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

### Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

| Transaksi Antar Entitas                | Nilai                 |
|--|-----------------------|
| Diterima dari Entitas Lain             | (65.047.751)          |
| Ditagihkan ke Entitas Lain             | 18.592.721.611        |
| Transfer Masuk                         | 10.194.62             |
| Transfer Keluar                        | (1.110.092.503)       |
| Pengesahan Hibah Langsung              | -                     |
| Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung | -                     |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>17.427.775.982</b> |

#### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga per 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp(65.047.751),- sedangkan DKEL sebesar Rp18.592.721.611.

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal per 31 Desember 2021 sebesar Rp 10.194.625,- terdiri dari:

| No | Jenis               | Entitas Asal            | Nilai             |
|----|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 1  | Peralatan dan Mesin | Balitbang Hukum dan HAM | 10.194.625        |
| 2  | Lisensi             |                         | -                 |
| 3  | Persediaan          |                         | -                 |
|    | <b>Jumlah</b>       |                         | <b>10.194.625</b> |

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.110.092.503,- yang merupakan transfer Tanah dan Gedung & Bangunan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT ke Lembaga Masyarakat Kelas III Lembata dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua.

*Ekuitas*      **E.5 Ekuitas Akhir**

*Akhir*      Nilai ekuitas akhir pada tanggal per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-  
*Rp68.945.336.713,-*      masing sebesar **Rp68.945.336.713,-** dan **Rp 75.726.693.906,-**.  
*336.713,-*

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

- Tidak ada

### **F.2 Pengungkapan Lain-Lain**

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-35.KP.03.03 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat Mutasi atau Penggantian Kepala Bagian Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a.n Muhamad Wahab Marawali, SE, MM.
2. Terdapat perolehan Peralatan Mesin berupa Air Conditioner (AC) sebanyak 11 unit dari pekerjaan konstruksi Rehab Ruang Arsip dengan menggunakan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121).

### **F.3 Temuan dan Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal**

Pada Semester I Tahun 2021 Tim Inspektorat Jenderal melakukan Audit Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur atas Pengadaan Barang/Jasa berupa Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dengan uraian hasil Audit sebagai berikut:

1. Kekurangan Volume Fisik pekerjaan yang terpasang atas pekerjaan pembangunan sumur bor kantor sebesar Rp 5.250.000,-
2. Kekurangan Volume Fisik Pekerjaan yang terpasang atas pekerjaan pembangunan pagar keliling kantor dan denda keterlambatan pembangunan pagar keliling kantor sebesar Rp 13.562.915,82
3. Kelebihan Pembayaran atas Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Pagar Keliling kantor dan pembuatan halaman parkir kantor sebesar Rp 7.475.000,-



4. Kelebihan pembayaran atas jasa konsultan perencanaan pembangunan sumur bor kantor sebesar Rp 4.275.000,-
5. Kelebihan pembayaran atas biaya non personil jasa konsultan pengawas rehabilitasi pagar keliling kantor, pembuatan halaman parkir, dan pembangunan sumur bor kantor sebesar Rp 1.890.000.

Atas temuan hasil audit tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT telah melakukan Tindak lanjut Hasil temuan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Wilayah telah memerintahkan kepada PPK untuk menarik kelebihan pembayaran kepada CV. Jusaera Jaya dan telah dibayar lunas sebesar Rp5.250.000,00 (Bukti Setor terlampir).
2. Kepala Kantor Wilayah telah memerintahkan kepada PPK untuk menarik kelebihan pembayaran kepada CV. Sola Kristi dan telah dibayar lunas sebesar Rp13.562.915,82 (Bukti Setor terlampir).
3. Kepala Kantor Wilayah telah memerintahkan kepada PPK untuk menarik kelebihan pembayaran kepada CV. Galang Mitra Sejahtera dan telah dibayar lunas sebesar Rp7.475.000,00 (Bukti Setor terlampir).
4. Kantor Wilayah telah memerintahkan kepada PPK untuk menarik kelebihan pembayaran kepada CV. Loka Pratama dan telah dibayar lunas sebesar Rp4.275.000,00 (Bukti Setor terlampir).
5. Kepala Kantor Wilayah telah memerintahkan kepada PPK untuk menarik kelebihan pembayaran kepada CV. Multi Karya Permanen dan telah dibayar lunas sebesar Rp1.890.000,00 (Nota Dinas, Surat Pemberitahuan serta Bukti Setor terlampir).

### **F.3 Rekening Pemerintah**

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Satker SETJEN memiliki 1 Rekening atas nama BPg 039 KANWIL HUKUM DAN HAM NTT 408886 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kupang dengan Nomor Rekening : 0039-01-001039-30-4
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Satker SETJEN tidak memiliki Rekening Bendahara Penerimaan.

Lampiran I : Penyusutan Aset Tetap

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT  
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi  
Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap  
Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
 TAHUN ANGGARAN 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UAKPB : 408886 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tanggal : 08/08/22 11:58 PM  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_face\_k3\_sat

| AKUN NERACA        |  | JUMLAH                |
|--------------------|--|-----------------------|
| KODE               | URAIAN   |                       |
| 1                  | 2  | 3                     |
| 117111             | Barang Konsumsi  | 13,170,450            |
| 117113             | Bahan untuk Pemeliharaan                                   | 3,599,500             |
| 131111             | Tanah  | 49,122,225,800        |
| 132111             | Peralatan dan Mesin  | 10,706,259,372        |
| 133111             | Gedung dan Bangunan  | 20,990,840,531        |
| 135121             | Aset Tetap Lainnya   | 96,656,391            |
| 136111             | Konstruksi Dalam pengerjaan                                | 2,147,614,835         |
| 137111             | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin                   | (9,896,928,798)       |
| 137211             | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan                   | (3,896,411,487)       |
| 166112             | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 1,358,273,149         |
| 169122             | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam | (1,320,867,760)       |
| <b>J U M L A H</b> |  | <b>69,324,431,983</b> |

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
UAKPB : 408886 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tanggal : 08/08/22 11:58 PM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_persediaan\_satker

| Kode                            | Uraian                                  | Jumlah            |
|---------------------------------|---|-------------------|
| 117111                          | Barang Konsumsi                         |                   |
| 1010301001                      | Alat Tulis                              | 1,220,500         |
| 1010301003                      | Penjepit Kertas                         | 1,123,500         |
| 1010301005                      | Buku Tulis                              | 106,000           |
| 1010301006                      | Ordner Dan Map                          | 1,841,000         |
| 1010301010                      | Alat Perekat                            | 776,000           |
| 1010301012                      | Staples                                 | 480,900           |
| 1010301999                      | Alat Tulis Kantor Lainnya               | 212,000           |
| 1010302001                      | Kertas HVS                              | 4,538,100         |
| 1010302002                      | Berbagai Kertas                         | 541,000           |
| 1010302003                      | Kertas Cover                            | 124,000           |
| 1010302004                      | Amplop                                  | 253,000           |
| 1010306010                      | Batu Baterai                            | 343,750           |
| 1010311999                      | Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya | 760,000           |
| 1010314001                      | Obat Cair (Barang Konsumsi)             | 414,500           |
| 1010314002                      | Obat Padat (Barang Konsumsi)            | 394,200           |
| 1010314005                      | Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)       | 42,000            |
| Jumlah Barang Konsumsi          |   | 13,170,450        |
| 117113                          | Bahan untuk Pemeliharaan                |                   |
| 1010305001                      | Sapu Dan Sikat                          | 472,500           |
| 1010305002                      | Alat-Alat Pel Dan Lap                   | 775,000           |
| 1010305008                      | Bahan Kimia Untuk Pembersih             | 1,672,500         |
| 1010305012                      | Pengharum Ruangan                       | 679,500           |
| Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan |   | 3,599,500         |
| <b>TOTAL</b>                    |   | <b>16,769,950</b> |

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
 KDUAPPAW : 013012400KD BA(013) ES1(01) NUSA TENGGARA TIMUR  
 KODE SATKER : 408886 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl. Cetak 08/08/2022 11:56 PM  
 lap\_neraca\_satker\_komparatif --rekon17

| NAMA PERKIRAAN                               | JUMLAH                |                       | Kenaikan (Penurunan)   |                |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|  | 2021                  | 2020                  | Jumlah                 | %              |
| 1  | 2                     | 3                     | 4                      | 5              |
| <b>ASET</b>                                  |                       |                       |                        |                |
| <b>ASET LANCAR</b>                           |                       |                       |                        |                |
| Persediaan                                   | 16,769,950            | 3,173,500             | 13,596,450             | 428.44         |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                    | <b>16,769,950</b>     | <b>3,173,500</b>      | <b>13,596,450</b>      | <b>428.44</b>  |
| <b>ASET TETAP</b>                            |                       |                       |                        |                |
| Tanah  | 49,122,225,800        | 49,256,358,800        | (134,133,000)          | (0.27)         |
| Peralatan dan Mesin                          | 10,706,259,372        | 11,352,068,972        | (645,809,600)          | (5.69)         |
| Gedung dan Bangunan                          | 20,990,840,531        | 22,940,815,836        | (1,949,975,305)        | (8.50)         |
| Aset Tetap Lainnya                           | 96,656,391            | 96,656,391            | 0                      | 0.00           |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                  | 2,147,614,835         | 0                     | 2,147,614,835          | 0.00           |
| AKUMULASI PENYUSUTAN                         | (13,793,340,285)      | (13,307,125,240)      | (486,215,045)          | 3.65           |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                     | <b>69,270,256,644</b> | <b>70,338,774,759</b> | <b>(1,068,518,115)</b> | <b>(1.52)</b>  |
| <b>ASET LAINNYA</b>                          |                       |                       |                        |                |
| Aset Lain-lain                               | 1,358,273,149         | 7,150,790,949         | (5,792,517,800)        | (81.01)        |
| AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA | (1,320,867,760)       | (1,766,045,302)       | 445,177,542            | (25.21)        |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                   | <b>37,405,389</b>     | <b>5,384,745,647</b>  | <b>(5,347,340,258)</b> | <b>(99.31)</b> |
| <b>JUMLAH ASET</b>                           | <b>69,324,431,983</b> | <b>75,726,693,906</b> | <b>(6,402,261,923)</b> | <b>(8.45)</b>  |

| <b>EKUITAS</b>                      |                       |                       |                        |               |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| <b>EKUITAS</b>                      |                       |                       |                        |               |
| Ekuitas                             | 69,324,431,983        | 75,726,693,906        | (6,402,261,923)        | (8.45)        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>               | <b>69,324,431,983</b> | <b>75,726,693,906</b> | <b>(6,402,261,923)</b> | <b>(8.45)</b> |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>               | <b>69,324,431,983</b> | <b>75,726,693,906</b> | <b>(6,402,261,923)</b> | <b>(8.45)</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b> | <b>69,324,431,983</b> | <b>75,726,693,906</b> | <b>(6,402,261,923)</b> | <b>(8.45)</b> |

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER DESEMBER 2021  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
UNIT ORGANISASI : 01  
WILAYAH/PROVINSI : 2400  
SATUAN KERJA : 408886

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
SEKRETARIAT JENDERAL  
NUSA TENGGARA TIMUR  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl. Cetak 08/08/2022 11:57 PM  
lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN   | DEBET          | KREDIT         |
|----------|-----------|---|----------------|----------------|
| 1        | 2         | 3   | 4              | 5              |
| 0.0      | 111611    | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 0              | 0              |
| 0.0      | 111613    | Kas di Bendahara Pengeluaran TUP  | 0              | 0              |
| 0.0      | 117111    | Barang Konsumsi   | 13,170,450     | 0              |
| 0.0      | 117113    | Bahan untuk Pemeliharaan  | 3,599,500      | 0              |
| 0.0      | 117911    | Persediaan yang Belum Diregister  | 0              | 0              |
| 0.0      | 131111    | Tanah   | 49,122,225,800 | 0              |
| 0.0      | 131211    | Tanah Belum Diregister  | 0              | 0              |
| 0.0      | 132111    | Peralatan dan Mesin   | 10,706,259,372 | 0              |
| 0.0      | 133111    | Gedung dan Bangunan   | 20,990,840,531 | 0              |
| 0.0      | 135121    | Aset Tetap Lainnya  | 96,656,391     | 0              |
| 0.0      | 136111    | Konstruksi Dalam pengerjaan   | 2,147,614,835  | 0              |
| 0.0      | 137111    | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin  | 0              | 9,896,928,798  |
| 0.0      | 137211    | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan  | 0              | 3,896,411,487  |
| 0.0      | 166112    | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan                      | 1,358,273,149  | 0              |
| 0.0      | 169122    | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 0              | 1,320,867,760  |
| 0.0      | 218211    | Hibah Langsung yang belum disahkan  | 0              | 0              |
| 0.0      | 219511    | Uang Muka dari KPPN   | 0              | 0              |
| 0.0      | 313111    | Ditagihkan ke Entitas Lain  | 0              | 18,592,721,611 |
| 0.0      | 313121    | Diterima dari Entitas Lain  | 65,047,751     | 0              |
| 0.0      | 313211    | Transfer Keluar   | 1,110,092,503  | 0              |
| 0.0      | 313221    | Transfer Masuk  | 0              | 10,194,625     |
| 0.0      | 391111    | Ekuitas   | 0              | 75,726,693,906 |
| 0.0      | 391116    | Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi  | 7,432,144,934  | 0              |
| 0.0      | 391133    | Pengesahan Hibah Langsung TAYL  | 0              | 899,397,000    |
| 3.0      | 425131    | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan                                     | 0              | 6,721,492      |
| 3.0      | 425811    | Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah                              | 0              | 20,408,136     |
| 3.0      | 425911    | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu                     | 0              | 206            |
| 3.0      | 425912    | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu                      | 0              | 5,465,000      |
| 3.0      | 425913    | Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu                       | 0              | 32,452,917     |
| 3.0      | 511111    | Beban Gaji Pokok PNS  | 6,569,865,200  | 0              |
| 3.0      | 511119    | Beban Pembulatan Gaji PNS   | 110,801        | 0              |
| 3.1      | 511119    | Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS  | 0              | 2,466          |
| 3.0      | 511121    | Beban Tunj. Suami/Istri PNS   | 411,425,228    | 0              |
| 3.0      | 511122    | Beban Tunj. Anak PNS  | 118,565,546    | 0              |
| 3.0      | 511123    | Beban Tunj. Struktural PNS  | 449,960,000    | 0              |
| 3.0      | 511124    | Beban Tunj. Fungsional PNS  | 313,484,000    | 0              |
| 3.0      | 511125    | Beban Tunj. PPh PNS   | 31,112,100     | 0              |
| 3.0      | 511126    | Beban Tunj. Beras PNS   | 351,019,740    | 0              |

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER DESEMBER 2021  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
UNIT ORGANISASI : 01  
WILAYAH/PROVINSI : 2400  
SATUAN KERJA : 408886

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
SEKRETARIAT JENDERAL  
NUSA TENGGARA TIMUR  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl. Cetak 08/08/2022 11:57 PM  
lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

| KODE TRN      | KODE AKUN | NAMA AKUN  | DEBET                  | KREDIT                 |
|---------------|-----------|--|------------------------|------------------------|
| 1             | 2         | 3  | 4                      | 5                      |
| 3.0           | 511129    | Beban Uang Makan PNS   | 1,133,680,000          | 0                      |
| 3.0           | 511151    | Beban Tunjangan Umum PNS   | 204,015,000            | 0                      |
| 3.1           | 511151    | Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS  | 0                      | 555,000                |
| 3.0           | 512211    | Beban Uang Lembur  | 91,866,000             | 0                      |
| 3.0           | 521111    | Beban Keperluan Perkantoran  | 822,546,203            | 0                      |
| 3.0           | 521114    | Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat   | 10,750,900             | 0                      |
| 3.0           | 521115    | Beban Honor Operasional Satuan Kerja   | 208,290,000            | 0                      |
| 3.0           | 521119    | Beban Barang Operasional Lainnya   | 236,616,730            | 0                      |
| 3.0           | 521131    | Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19                                   | 85,310,000             | 0                      |
| 3.0           | 521211    | Beban Bahan  | 341,650,150            | 0                      |
| 3.0           | 521213    | Beban Honor Output Kegiatan  | 51,800,000             | 0                      |
| 3.0           | 521219    | Beban Barang Non Operasional Lainnya   | 54,475,709             | 0                      |
| 3.0           | 522111    | Beban Langganan Listrik  | 205,565,008            | 0                      |
| 3.0           | 522113    | Beban Langganan Air  | 8,440,000              | 0                      |
| 3.0           | 522141    | Beban Sewa   | 1,295,880,818          | 0                      |
| 3.0           | 522151    | Beban Jasa Profesi   | 25,200,000             | 0                      |
| 3.0           | 522192    | Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19   | 29,991,000             | 0                      |
| 3.0           | 523111    | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   | 423,632,398            | 0                      |
| 3.1           | 523111    | Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                      | 0                      | 6,047,045              |
| 3.0           | 523121    | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   | 497,854,814            | 0                      |
| 3.1           | 523121    | Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                      | 0                      | 4,924,852              |
| 3.0           | 524111    | Beban Perjalanan Biasa   | 1,155,221,082          | 0                      |
| 3.0           | 524113    | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 163,280,000            | 0                      |
| 3.0           | 591111    | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin   | 725,331,880            | 0                      |
| 3.0           | 591211    | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan   | 948,896,458            | 0                      |
| 3.0           | 592222    | Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah | 67,718,270             | 0                      |
| 3.0           | 593111    | Beban Persediaan konsumsi  | 193,237,650            | 0                      |
| 3.0           | 593113    | Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan  | 18,474,400             | 0                      |
| 3.0           | 596111    | Beban Kerugian Pelepasan Aset  | 128,600,000            | 0                      |
| <b>JUMLAH</b> |           |  | <b>110,419,792,301</b> | <b>110,419,792,301</b> |

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER DESEMBER 2021  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
UNIT ORGANISASI : 01  
WILAYAH/PROVINSI : 2400  
SATUAN KERJA : 408886

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
SEKRETARIAT JENDERAL  
NUSA TENGGARA TIMUR  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl. Cetak 08/08/2022 11:57 PM  
lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN  | DEBET         | KREDIT        |
|----------|-----------|--|---------------|---------------|
| 1        | 2         | 3  | 4             | 5             |
| 0.0      | 115612    | Piutang dari KPPN  | 2,106,477,389 | 0             |
| 0.0      | 219711    | Utang Kepada KUN   | 65,047,751    | 0             |
| 2.0      | 511111    | Allotment Belanja Gaji Pokok PNS                                       | 0             | 6,607,900,000 |
| 2.0      | 511119    | Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS                                  | 0             | 113,000       |
| 2.0      | 511121    | Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS                                | 0             | 413,094,000   |
| 2.0      | 511122    | Allotment Belanja Tunj. Anak PNS                                       | 0             | 119,324,000   |
| 2.0      | 511123    | Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS                                 | 0             | 452,480,000   |
| 2.0      | 511124    | Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS                                 | 0             | 313,984,000   |
| 2.0      | 511125    | Allotment Belanja Tunj. PPh PNS  | 0             | 35,609,000    |
| 2.0      | 511126    | Allotment Belanja Tunj. Beras PNS                                      | 0             | 353,164,000   |
| 2.0      | 511129    | Allotment Belanja Uang Makan PNS                                       | 0             | 1,168,797,000 |
| 2.0      | 511151    | Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS                                   | 0             | 205,130,000   |
| 2.0      | 512211    | Allotment Belanja Uang Lembur  | 0             | 91,889,000    |
| 2.0      | 521111    | Allotment Belanja Keperluan Perkantoran                                | 0             | 843,072,000   |
| 2.0      | 521114    | Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                     | 0             | 14,000,000    |
| 2.0      | 521115    | Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja                       | 0             | 209,520,000   |
| 2.0      | 521119    | Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya                           | 0             | 246,486,000   |
| 2.0      | 521131    | Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19     | 0             | 87,125,000    |
| 2.0      | 521211    | Allotment Belanja Bahan  | 0             | 370,873,000   |
| 2.0      | 521213    | Allotment Belanja Honor Output Kegiatan                                | 0             | 55,640,000    |
| 2.0      | 521219    | Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya                       | 0             | 56,949,000    |
| 2.0      | 521241    | Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 0             | 899,000       |
| 2.0      | 521811    | Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                    | 0             | 227,249,000   |
| 2.0      | 521841    | Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19      | 0             | 500,000       |
| 2.0      | 522111    | Allotment Belanja Langganan Listrik                                    | 0             | 216,000,000   |
| 2.0      | 522113    | Allotment Belanja Langganan Air  | 0             | 13,000,000    |
| 2.0      | 522141    | Allotment Belanja Sewa   | 0             | 1,318,790,000 |
| 2.0      | 522151    | Allotment Belanja Jasa Profesi   | 0             | 25,200,000    |
| 2.0      | 522192    | Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19                   | 0             | 31,344,000    |
| 2.0      | 523111    | Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                     | 0             | 459,607,000   |
| 2.0      | 523112    | Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   | 0             | 1,000,000     |
| 2.0      | 523121    | Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                     | 0             | 525,360,000   |
| 2.0      | 524111    | Allotment Belanja Perjalanan Biasa                                     | 0             | 1,184,470,000 |
| 2.0      | 524113    | Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                          | 0             | 191,070,000   |
| 2.0      | 533121    | Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan                 | 0             | 4,859,561,000 |
| 3.0      | 425131    | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan                            | 0             | 6,721,492     |
| 3.0      | 425811    | Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah                     | 0             | 20,408,136    |
| 3.0      | 425911    | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang                 | 0             | 206           |



**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER DESEMBER 2021  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
UNIT ORGANISASI : 01  
WILAYAH/PROVINSI : 2400  
SATUAN KERJA : 408886

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
SEKRETARIAT JENDERAL  
NUSA TENGGARA TIMUR  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl. Cetak 08/08/2022 11:57 PM  
lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN  | DEBET         | KREDIT     |
|----------|-----------|--|---------------|------------|
| 1        | 2         | 3  | 4             | 5          |
|          |           | Lalu   |               |            |
| 3.0      | 425912    | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu | 0             | 5,465,000  |
| 3.0      | 425913    | Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu  | 0             | 32,452,917 |
| 3.0      | 511111    | Belanja Gaji Pokok PNS                                     | 6,569,865,200 | 0          |
| 3.0      | 511119    | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                | 110,801       | 0          |
| 3.1      | 511119    | Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS                   | 0             | 2,466      |
| 3.0      | 511121    | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS                              | 411,425,228   | 0          |
| 3.0      | 511122    | Belanja Tunj. Anak PNS                                     | 118,565,546   | 0          |
| 3.0      | 511123    | Belanja Tunj. Struktural PNS                               | 449,960,000   | 0          |
| 3.0      | 511124    | Belanja Tunj. Fungsional PNS                               | 313,484,000   | 0          |
| 3.0      | 511125    | Belanja Tunj. PPh PNS                                      | 31,112,100    | 0          |
| 3.0      | 511126    | Belanja Tunj. Beras PNS                                    | 351,019,740   | 0          |
| 3.0      | 511129    | Belanja Uang Makan PNS                                     | 1,133,680,000 | 0          |
| 3.0      | 511151    | Belanja Tunjangan Umum PNS                                 | 204,015,000   | 0          |
| 3.1      | 511151    | Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS                    | 0             | 555,000    |
| 3.0      | 512211    | Belanja Uang Lembur  | 91,866,000    | 0          |
| 3.0      | 521111    | Belanja Keperluan Perkantoran                              | 822,546,203   | 0          |
| 3.0      | 521114    | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                   | 10,750,900    | 0          |
| 3.0      | 521115    | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja                     | 208,290,000   | 0          |
| 3.0      | 521119    | Belanja Barang Operasional Lainnya                         | 236,616,730   | 0          |
| 3.0      | 521131    | Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19   | 85,310,000    | 0          |
| 3.0      | 521211    | Belanja Bahan  | 341,650,150   | 0          |
| 3.0      | 521213    | Belanja Honor Output Kegiatan                              | 51,800,000    | 0          |
| 3.0      | 521219    | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                     | 54,475,709    | 0          |
| 3.0      | 521811    | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                  | 225,308,500   | 0          |
| 3.0      | 522111    | Belanja Langganan Listrik                                  | 205,565,008   | 0          |
| 3.0      | 522113    | Belanja Langganan Air                                      | 8,440,000     | 0          |
| 3.0      | 522141    | Belanja Sewa   | 1,295,880,818 | 0          |
| 3.0      | 522151    | Belanja Jasa Profesi                                       | 25,200,000    | 0          |
| 3.0      | 522192    | Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19                 | 29,991,000    | 0          |
| 3.0      | 523111    | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                   | 423,632,398   | 0          |
| 3.1      | 523111    | Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan      | 0             | 6,047,045  |
| 3.0      | 523121    | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                   | 497,854,814   | 0          |
| 3.1      | 523121    | Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin      | 0             | 4,924,852  |
| 3.0      | 524111    | Belanja Perjalanan Biasa                                   | 1,155,221,082 | 0          |
| 3.0      | 524113    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                        | 163,280,000   | 0          |
| 3.0      | 533121    | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan               | 3,087,334,047 | 0          |

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER DESEMBER 2021**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
UNIT ORGANISASI : 01  
WILAYAH/PROVINSI : 2400  
SATUAN KERJA : 408886

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
SEKRETARIAT JENDERAL  
NUSA TENGGARA TIMUR  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl. Cetak 08/08/2022 11:57 PM  
lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

| KODE TRN      | KODE AKUN | NAMA AKUN | DEBET                 | KREDIT                |
|---------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1             | 2         | 3         | 4                     | 5                     |
| <b>JUMLAH</b> |           |           | <b>20,775,776,114</b> | <b>20,775,776,114</b> |

LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
WILAYAH/PROVINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR  
SATUAN KERJA : 408886 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG  
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT  
Tanggal : 08/08/22 11:57  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lo\_satker --  
Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

| URAIAN  | 2021          | 2020          | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%)     |
|---|---------------|---------------|------------------------|---------|
| KEGIATAN OPERASIONAL  | 0             | 0             | 0                      |         |
| PENDAPATAN OPERASIONAL  | 0             | 0             | 0                      |         |
| PENDAPATAN PERPAJAKAN   | 0             | 0             | 0                      |         |
| Pendapatan Pajak Penghasilan                                  | 0             | 0             | 0                      |         |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | 0             | 0             | 0                      |         |
| Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan                            | 0             | 0             | 0                      |         |
| Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan          | 0             | 0             | 0                      |         |
| Pendapatan Cukai  | 0             | 0             | 0                      |         |
| Pendapatan Pajak Lainnya                                      | 0             | 0             | 0                      |         |
| Pendapatan Bea Masuk  | 0             | 0             | 0                      |         |
| Pendapatan Bea Keluar   | 0             | 0             | 0                      |         |
| Jumlah Pendapatan Perpajakan                                  | 0             | 0             | 0                      |         |
| PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK                                 | 0             | 0             | 0                      |         |
| Pendapatan Sumber Daya Alam                                   | 0             | 0             | 0                      |         |
| Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba                        | 0             | 0             | 0                      |         |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya                         | 27,129,628    | 44,827,454    | (17,697,826)           | (39.48) |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak                          | 27,129,628    | 44,827,454    | (17,697,826)           | (39.48) |
| PENDAPATAN HIBAH  | 0             | 0             | 0                      |         |
| Pendapatan Hibah  | 0             | 0             | 0                      |         |
| Jumlah Pendapatan Hibah                                       | 0             | 0             | 0                      |         |
| Jumlah Pendapatan   | 27,129,628    | 44,827,454    | (17,697,826)           | (39.48) |
| BEBAN OPERASIONAL   | 0             | 0             | 0                      |         |
| Beban Pegawai   | 9,674,546,149 | 8,764,836,549 | 909,709,600            | 10.379  |
| Beban Persediaan  | 193,237,650   | 90,748,050    | 102,489,600            | 112.939 |
| Beban Barang dan Jasa   | 3,376,516,518 | 3,316,308,661 | 60,207,857             | 1.816   |
| Beban Pemeliharaan  | 928,989,715   | 823,132,600   | 105,857,115            | 12.86   |
| Beban Perjalanan Dinas  | 1,318,501,082 | 1,378,450,750 | (59,949,668)           | (4.349) |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat               | 0             | 0             | 0                      |         |
| Beban Bunga   | 0             | 0             | 0                      |         |
| Beban Subsidi   | 0             | 0             | 0                      |         |
| Beban Hibah   | 0             | 0             | 0                      |         |

LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
WILAYAH/PROVINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR  
SATUAN KERJA : 408886 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG  
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT  
Tanggal : 08/08/22 11:57  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lo\_satker --  
Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

| URAIAN  | 2021                    | 2020                    | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%)             |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| Beban Bantuan Sosial  | 0                       | 0                       | 0                      |                 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                             | 1,741,946,608           | 2,082,544,805           | (340,598,197)          | (16.355)        |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                       | 0                       | 0                       | 0                      |                 |
| Beban Lain-Lain   | 0                       | 0                       | 0                      |                 |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>   | <b>17,233,737,722</b>   | <b>16,456,021,415</b>   | <b>777,716,307</b>     | <b>4.726</b>    |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>            | <b>(17,206,608,094)</b> | <b>(16,411,193,961)</b> | <b>(795,414,133)</b>   | <b>4.847</b>    |
| <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                             | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>               |                 |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar                   | (128,600,000)           | 0                       | (128,600,000)          | ()              |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar                        | 0                       | 0                       | 0                      |                 |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar                             | 128,600,000             | 0                       | 128,600,000            |                 |
| Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang       | 0                       | 0                       | 0                      |                 |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang            | 0                       | 0                       | 0                      |                 |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang                 | 0                       | 0                       | 0                      |                 |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya       | 37,918,123              | 61,081,506              | (23,163,383)           | (37.922)        |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya            | 37,918,123              | 61,081,506              | (23,163,383)           | (37.922)        |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya                 | 0                       | 0                       | 0                      |                 |
| <b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> | <b>(90,681,877)</b>     | <b>61,081,506</b>       | <b>(151,763,383)</b>   | <b>(248.46)</b> |
| <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>               | <b>(17,297,289,971)</b> | <b>(16,350,112,455)</b> | <b>(947,177,516)</b>   | <b>5.793</b>    |
| POS LUAR BIASA  | 0                       | 0                       | 0                      |                 |
| Beban Luar Biasa  | 0                       | 0                       | 0                      |                 |
| POS LUAR BIASA  | 0                       | 0                       | 0                      |                 |
| <b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>                                 | <b>(17,297,289,971)</b> | <b>(16,350,112,455)</b> | <b>(947,177,516)</b>   | <b>5.793</b>    |

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TINGKAT SATKER**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
WILAYAH/PROVINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR  
JENIS SATUAN KERJA : KD  
SATUAN KERJA : 408886 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Kode Lap : LPE.SATKER  
Tanggal : 08/08/22 11:58 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lpe\_satker --rekon17

| URAIAN   | 2021             | 2020             | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%) |
|--|------------------|------------------|------------------------|-----|
| EKUITAS AWAL                                   | 75,726,693,906   | 75,758,337,351   | (31,643,445)           | -   |
| SURPLUS/DEFISIT-LO                             | (17,297,289,971) | (16,350,112,455) | (947,177,516)          | -   |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI | 0                | 0                | 0                      | -   |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS       | (7,432,144,934)  | 222,018,239      | (7,654,163,173)        | -   |
| PENYESUAIAN NILAI ASET                         | 0                | 0                | 0                      | -   |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                       | 0                | 0                | 0                      | -   |
| KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI                     | 0                | 0                | 0                      | -   |
| SELISIH REVALUASI ASET                         | 0                | (662,626,512)    | 662,626,512            | -   |
| KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI               | (7,432,144,934)  | 884,644,751      | (8,316,789,685)        | -   |
| LAIN-LAIN                                      | 0                | 0                | 0                      | -   |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS                        | 18,327,172,982   | 16,096,450,771   | 2,230,722,211          | -   |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS                     | (6,402,261,923)  | (31,643,445)     | (6,370,618,478)        | -   |
| EKUITAS AKHIR                                  | 69,324,431,983   | 75,726,693,906   | (6,402,261,923)        | -   |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013  
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01  
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG 408886

Kode Lap : LRA.F.S  
Tanggal : 08/08/22 11:57 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_face\_satker\_komparatif --

| NO       | URAIAN                             | 2021           |                |                           |    | 2020           |                |                           |    |
|----------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----|----------------|----------------|---------------------------|----|
|          |                                    | ANGGARAN       | REALISASI      | REALISASI DI ATAS (BAWAH) | %  | ANGGARAN       | REALISASI      | REALISASI DI ATAS (BAWAH) | %  |
| 1        | 2                                  | 3              | 4              | 5                         | 6  | 3              | 4              | 5                         | 6  |
| <b>A</b> | <b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b> |                |                |                           | 0  |                |                |                           | 0  |
|          | PENERIMAAN PERPAJAKAN              | 0              | 0              | 0                         | 0  | 0              | 0              | 0                         | 0  |
|          | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK      | 0              | 65,047,751     | 65,047,751                | 0  | 0              | 105,908,960    | 105,908,960               | 0  |
|          | PENERIMAAN HIBAH                   | 0              | 0              | 0                         | 0  | 0              | 0              | 0                         | 0  |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b> | 0              | 65,047,751     | 65,047,751                | 0  | 0              | 105,908,960    | 105,908,960               | 0  |
| <b>B</b> | <b>BELANJA</b>                     |                |                |                           | 0  |                |                |                           | 0  |
|          | BELANJA PEGAWAI                    | 9,761,484,000  | 9,674,546,149  | (86,937,851)              | 99 | 9,249,195,000  | 8,764,836,549  | (484,358,451)             | 95 |
|          | BELANJA BARANG                     | 6,078,154,000  | 5,830,841,415  | (247,312,585)             | 96 | 6,324,026,000  | 5,602,733,561  | (721,292,439)             | 89 |
|          | BELANJA MODAL                      | 4,859,561,000  | 3,087,334,047  | (1,772,226,953)           | 64 | 1,816,486,000  | 1,604,824,336  | (211,661,664)             | 88 |
|          | BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG | 0              | 0              | 0                         | 0  | 0              | 0              | 0                         | 0  |
|          | BELANJA SUBSIDI                    | 0              | 0              | 0                         | 0  | 0              | 0              | 0                         | 0  |
|          | BELANJA HIBAH                      | 0              | 0              | 0                         | 0  | 0              | 0              | 0                         | 0  |
|          | BELANJA BANTUAN SOSIAL             | 0              | 0              | 0                         | 0  | 0              | 0              | 0                         | 0  |
|          | BELANJA LAIN-LAIN                  | 0              | 0              | 0                         | 0  | 0              | 0              | 0                         | 0  |
|          | <b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b> | 20,699,199,000 | 18,592,721,611 | (2,106,477,389)           | 90 | 17,389,707,000 | 15,972,394,446 | (1,417,312,554)           | 90 |
| <b>C</b> | <b>PEMBIAYAAN</b>                  |                |                |                           | 0  |                |                |                           | 0  |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
WILAYAH/PROVINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR  
SATUAN KERJA : 408886 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 08/08/22 11:58  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_satker --

| KODE   | URAIAN  | ESTIMASI PENDAPATAN | REALISASI PENDAPATAN |                         |                  | % REALISASI PENDAPATAN |
|--------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
|        |   |                     | PENDAPATAN           | PENGEMBALIAN PENDAPATAN | PENDAPATAN NETTO |                        |
| 1      | 2   | 3                   | 4                    | 5                       | 6=4-5            | 7=6/3                  |
| 42     | PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                      |                     |                      |                         |                  |                        |
| 4251   | Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha |                     |                      |                         |                  |                        |
| 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan                   | 0                   | 6,721,492            | 0                       | 6,721,492        | 0                      |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251                           | 0                   | 6,721,492            | 0                       | 6,721,492        |                        |
| 4258   | Pendapatan Denda  |                     |                      |                         |                  |                        |
| 425811 | Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah            | 0                   | 20,408,136           | 0                       | 20,408,136       | 0                      |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258                           | 0                   | 20,408,136           | 0                       | 20,408,136       |                        |
| 4259   | Pendapatan Lain-Lain  |                     |                      |                         |                  |                        |
| 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu   | 0                   | 206                  | 0                       | 206              | 0                      |
| 425912 | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu    | 0                   | 5,465,000            | 0                       | 5,465,000        | 0                      |
| 425913 | Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu     | 0                   | 32,452,917           | 0                       | 32,452,917       | 0                      |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259                           | 0                   | 37,918,123           | 0                       | 37,918,123       |                        |
|        | JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42                                 | 0                   | 65,047,751           | 0                       | 65,047,751       |                        |
|        | JUMLAH PENDAPATAN   | 0                   | 65,047,751           | 0                       | 65,047,751       |                        |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
ESELON I : 01  
WILAYAH/PROVINSI : 2400  
SATUAN KERJA : 408886  
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
SEKRETARIAT JENDERAL  
BA(013) ES1(01) NUSA TENGGARA TIMUR  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Kode Lap : LRA.B.S.  
Tanggal : 08/08/22 11:58  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_covid --  
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

| KODE   | URAIAN   | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA |                      |               | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|--|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|        |  |                 |                         | BELANJA           | PENGEMBALIAN BELANJA | BELANJA NETTO |                      |               |
| 1      | 2  | 3               | 4                       | 5                 | 6                    | 7=5-6         | 8=5/4                | 9=4-7         |
| 52     | BELANJA BARANG   |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 5211   | Belanja Barang Operasional                                   |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 521131 | Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19     | 36,000,000      | 87,125,000              | 85,310,000        | 0                    | 85,310,000    | 97.92                | 1,815,000     |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211                             | 36,000,000      | 87,125,000              | 85,310,000        | 0                    | 85,310,000    | 97.92                | 1,815,000     |
| 5212   | Belanja Barang Non Operasional                               |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 521241 | Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 289,500,000     | 899,000                 | 0                 | 0                    | 0             | 0                    | 899,000       |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212                             | 289,500,000     | 899,000                 | 0                 | 0                    | 0             | 0                    | 899,000       |
| 5218   | Belanja Barang Persediaan                                    |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 521841 | Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19      | 48,400,000      | 500,000                 | 0                 | 0                    | 0             | 0                    | 500,000       |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218                             | 48,400,000      | 500,000                 | 0                 | 0                    | 0             | 0                    | 500,000       |
| 5221   | Belanja Jasa   |                 |                         |                   |                      |               |                      |               |
| 522192 | Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19                   | 0               | 31,344,000              | 29,991,000        | 0                    | 29,991,000    | 95.68                | 1,353,000     |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221                             | 0               | 31,344,000              | 29,991,000        | 0                    | 29,991,000    | 95.68                | 1,353,000     |
|        | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52                                   | 373,900,000     | 119,868,000             | 115,301,000       | 0                    | 115,301,000   | 96.19                | 4,567,000     |
|        | JUMLAH BELANJA   | 373,900,000     | 119,868,000             | 115,301,000       | 0                    | 115,301,000   | 96.19                | 4,567,000     |



**RINCIAN REALISASI BELANJA DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19  
TA. 2021**

Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

| NO                 | KODE SATKER        | NAMA SATKER                                  | KODE AKUN BELANJA   | NO SP2D  | JUMLAH   | RINCIAN BELANJA   | KETERANGAN  | LANGKAH-LANGKAH MITIGASI   |
|--------------------|--------------------|--|---|--|--|---|---|--|
| <i>a</i>           | <i>b</i>           | <i>c</i>                                     | <i>d</i>  | <i>e</i>   | <i>f</i>   | <i>g</i>  | <i>h</i>  | <i>i</i>   |
| <i>sudah jelas</i> | <i>sudah jelas</i> | <i>sudah jelas</i>                           | <i>diisi dengan kode akun belanja yang telah terbit SP2D dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19 ataupun tidak</i> | <i>diisi dengan nomor SP2D atas belanja di kolom d</i> | <i>diisi dengan nilai belanja yang ada di SP2D</i> | <i>diisi dengan nama kegiatan atau jenis barang yang dibelanjakan</i> | <i>diisi dengan alasan penggunaan akun belanja yang tidak sesuai dalam rangka penanganan pandemi COVID-19</i> | <i>diisi dengan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dalam rangka menanggulangi potensi kesalahan penggunaan akun belanja</i> |
| 1                  | 408886             | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT | 521131  | 210391301000485  | 2.572.600  | Vitamin   |   |  |
|                    |                    |  | 521131  | 210391301004601  | 16.100.000   | Masker  |   |  |
|                    |                    |  | 521131  | 210391301013505  | 2.714.900  | Hand Sanitizer  |   |  |
|                    |                    |  | 521131  | 210391303004759  | 7.800.000  | Lisensi ID Zoom Bulan Mei & Juni                                      |   |  |
|                    |                    |  | 521131  | 210391303002478  | 7.800.000  | Lisensi ID Zoom Bulan Maret & April                                   |   |  |
|                    |                    |  | 521131  | 210391303000460  | 7.800.000  | Lisensi ID Zoom Bulan Januari & Februari                              |   |  |
|                    |                    |  | 521131  | 210391301019155  | 591.000  | Masker dan Vitamin  |   |  |
|                    |                    |  | 521131  | 210391303008629  | 7.800.000  | Lisensi ID Zoom Bulan Juli & Agustus                                  |   |  |
|                    |                    |  | 521131  | 210391301025693  | 16.250.000   |   |   |  |
|                    |                    |  | 521131  | 210391301031631  | 336.500  |   |   |  |
|                    |                    |  | 521131  | 210391701000770  | 4.125.000  |   |   |  |
|                    |                    |  | 521131  | 210391303015626  | 9.720.000  |   |   |  |
|                    |                    |  | 521131  | 210391701002234  | 1.700.000  |   |   |  |
|                    |                    |  | 522192  | 210391301005638  | 7.895.000  | Biaya Swab Perjadin   |   |  |
|                    |                    |  | 522192  | 210391301010243  | 1.595.000  | Biaya Swab Perjadin   |   |  |
|                    |                    |  | 522192  | 210391301011534  | 850.000  | Biaya Swab Perjadin   |   |  |
|                    |                    |  | 522192  | 210391301013505  | 400.000  | Biaya Swab Perjadin   |   |  |
|                    |                    |  | 522192  | 210391301014969  | 410.000  | Biaya Swab Perjadin   |   |  |
|                    |                    |  | 522192  | 210391301016853  | 145.000  | Biaya Swab Perjadin   |   |  |
|                    |                    |  | 522192  | 210391301028628  | 8.075.000  | Biaya Swab Perjadin   |   |  |
|                    |                    |  | 522192  | 210391701000658  | 2.493.000  | Biaya Swab Perjadin   |   |  |
|                    |                    |  | 522192  | 210391301030446  | 1.761.000  | Biaya Swab Perjadin   |   |  |
|                    |                    |  | 522192  | 210391301031632  | 1.475.000  | Biaya Swab Perjadin   |   |  |
|                    |                    |  | 522192  | 210391701000770  | 882.000  | Biaya Swab Perjadin   |   |  |
|                    |                    |  | 522192  | 210391701002233  | 815.000  | Biaya Swab Perjadin   |   |  |
|                    |                    |  | 522192  | 210391701002234  | 3.195.000  | Biaya Swab Perjadin   |   |  |
| <b>TOTAL</b>       |                    |  |   |  | Rp 115.301.000                                     |   |   |  |